

Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan BM terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi

Riza Amami¹, Kiki Asmara²

^{1, 2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

kikiasmara.ep@upnvjatim.ac.id

Abstract

This research was conducted in Ngawi Regency for a period of 15 years starting from 2006 - 2020. Poverty is a common problem experienced by each region and is also used as a benchmark for community welfare. One of the factors that affect the level of poverty is the allocation system of funds from various regional revenues, both from government subsidies or from original regional revenues resulting from the use of regional resources. The allocation of these sources of funds must be carried out in a planned manner as one of the efforts to reduce the level of poverty in an area. The purpose of this research is to determine and analyze the effect of local revenue on poverty in Ngawi Regency. To find out and analyze the effect of general allocation funds on poverty in Ngawi Regency. To find out and analyze the effect of special allocation funds on poverty in Ngawi Regency. And also to find out and analyze the effect of capital expenditure on poverty in Ngawi Regency. The approach taken is a type of quantitative research with a sampling technique in the form of purposive sampling technique. In this study, using a budget realization report from the Ngawi Regency document in numbers and poverty data from the Central Statistics Agency of Ngawi Regency in 2006 - 2020. The data used are secondary data types and the analysis technique is in the form of multiple linear regression analysis with the help of SPSS Software Version 25. From the results of this study indicate that local revenue does not have a positive effect on poverty; general allocation funds have a negative and significant effect on poverty; special allocation funds do not have a negative effect on poverty; and capital expenditures do not have a positive effect on poverty. So this research is very helpful in identifying the causes of poverty in an area.

Keywords: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Capital Expenditure, Poverty.

Abstrak

Penelitian dilakukan di Kabupaten Ngawi selama 15 tahun terhitung mulai 2006 – 2020. Kemiskinan merupakan permasalahan yang lumrah dialami oleh tiap daerah dan juga dijadikan sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Tinggi rendahnya angka kemiskinan salah satunya dipengaruhi oleh sistem alokasi dana dari berbagai penerimaan daerah, baik dari subsidi pemerintah ataupun dari penerimaan asli daerah hasil pemanfaatan sumber daya daerah. Pengalokasian sumber dana tersebut harus dilakukan dengan terencana sebagai salah satu upaya penurunan tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Adapun tujuan dilakukan penelitian dengan maksud yaitu: untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana alokasi khusus terhadap kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Dan juga untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Pendekatan yang diambil yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel berupa teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian ini menggunakan laporan realisasi anggaran dari dokumen Kabupaten Ngawi dalam angka dan data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020. Data yang digunakan yaitu jenis data sekunder dan teknik analisisnya berupa analisis regresi linier berganda dengan bantuan *Software SPSS* Versi 25. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif terhadap kemiskinan; dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan; dana alokasi khusus tidak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan; dan belanja modal tidak berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Sehingga penelitian ini sangat membantu dalam mengidentifikasi penyebab kemiskinan dalam suatu daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal (BM), Kemiskinan.

Jurnal Ekobistek is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Orang dikatakan miskin ketika berada pada situasi secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmaninya baik dari makanan, tempat tinggal, dan juga pakaian. Kemiskinan sejatinya merupakan masalah sosial ekonomi yang lumrah dan selalu ada

pada setiap wilayah baik di daerah atau bahkan ditingkat negara. Kemiskinan juga berkaitan dengan terbatasnya lapangan pekerjaan pada suatu wilayah. Seseorang yang masuk dalam kategori miskin atau *the poor* yaitu orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan dari segi pendidikan juga segi kesehatan kurang memadai [1].

Berdasarkan Bank Dunia, penyebab kemiskinan di suatu negara tidak lain karena kurangnya pendapatan dan asset negara (*Lack Of Income and Assets*) dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, dan juga tingkat kesehatan masyarakat. Karena kemiskinan merupakan persoalan yang cukup serius maka perlu adanya perhatian serius juga bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Keberadaan program pengentasan kemiskinan telah menjadi tujuan pembangunan yang fundamental dan menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai efektifitas pelaksanaan berbagai program pembangunan suatu daerah [2]. Data tingkat kemiskinan pada Propinsi Jawa Timur disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Urutan Kemiskinan Tertinggi Di Provinsi Jawa Timur

No	Provinsi	Tingkat (%)
1	Sampang	20,71
2	Sumenep	19,48
3	Bangkalan	18,90
4	Probolinggo	17,76
5	Tuban	14,59
6	Ngawi	14,38
7	Pamekasan	13,95
8	Pacitan	13,67
9	Bondowoso	13,33
10	Lamongan	12,21

Angka kemiskinan di Kabupaten Ngawi diketahui tergolong tinggi dimana pergerakannya dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. terlihat mulai dari tahun 2014 jumlah kemiskinannya sebesar 123,20 ribu jiwa, di tahun berikutnya yaitu 2015 jumlah kemiskinan meningkat hingga 129,32 ribu jiwa dan berangsur menurun dengan baik hingga tahun 2019. Peningkatan sangat tinggi terjadi di tahun 2020 dimana jumlah penduduk miskin mencapai 128,19 juta jiwa dari yang semula 119,43% di tahun 2019 dan penyebab utamanya berasal dari munculnya Pandemi COVID-19.

Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia terutama di Kabupaten Ngawi yaitu dengan menerapkan berbagai macam kebijakan. Upaya penurunan angka kemiskinan yang dilakukan tersebut tentunya harus berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Mulai dari meminimalisir adanya ketimpangan melalui pemerataan pembangunan daerah khususnya peningkatan sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Kebijakan peletakan dasar otonomi daerah ditetapkan dengan mempertimbangkan dimana wilayah terdekat yang mampu menjangkau masyarakatnya. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, maka pemerintah daerah dapat sepenuhnya melaksanakan fungsi pembangunan sesuai dengan wewenang yang dimiliki daerah [3].

Otonomi daerah merupakan pelimpahan segala wewenang yang awal mulanya menjadi tanggung

jawab pemerintah pusat untuk kemudian dibebankan kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang tersebut mencakup penyerahan dan juga pengalihan pembiayaan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia. Dengan begitu daerah berpeluang besar dalam memanfaatkan potensi demi terpenuhinya kepentingan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Kebijakan yang dijalankan haruslah efektif, efisien, serta mendukung peran masyarakat dalam upaya meningkatkan pemerataan dan keadilan sehingga terciptalah kesejahteraan masyarakat yang dapat menekan angka kemiskinan [4].

Penerapan kebijakan otonomi daerah sejalan dengan kemunculan desentralisasi fiskal sebagai pengatur terkait ketersediaan fasilitas publik yang layak dan memadai [5]. Sehingga pemanfaatan akan potensi daerah dapat dilakukan secara maksimal dan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan jumlah lapangan pekerjaan. Otonomi daerah tidak mampu bergerak dengan sendirinya, maka munculnya APBD (Anggaran Pendapatan Asli Daerah) yaitu berperan sebagai alat pemegang tanggungjawab atas terlaksananya otonomi daerah.

APBD memiliki kedudukan yang tinggi dalam sebuah pemerintahan, karena perannya sebagai pemegang tanggungjawab atas berjalannya otonomi daerah. Dengan adanya APBD maka program-program pemerintah daerah dapat berjalan mulai dari program pemenuhan pelayanan terhadap masyarakat dan program pemenuhan instrumen keuangan daerah yang lain. Kedudukan APBD semakin kuat pada era desentralisasi fiskal, dimana kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan kinerja daerahnya diketahui oleh masyarakat. Komponen utama APBD yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan tetapi kontribusi terbesar pembentuk penerimaan daerah yaitu berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan [6].

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Ngawi karena berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2006 – 2020 sumber dana yang diterima mengalami kenaikan tiap tahunnya. Tingginya sumber dana tersebut sebagai sarana peningkatan pelayanan publik atau mencapai tujuan desentralisasi belum mampu menekan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan Kabupaten Ngawi sejak tahun 2012 masuk dalam kategori sepuluh besar Kabupaten termiskin di Jawa Timur. Bahkan terhitung lebih tinggi di tahun berikutnya dan menjadi lebih parah yaitu mulai tahun 2018 dikategorikan menjadi Kabupaten termiskin ke enam di Jawa Timur hingga tahun 2020.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari beberapa susunan rencana tahunan yang terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada suatu daerah. Untuk kemudian diresmikan oleh

pemerintah daerah sesuai dengan peraturan pada daerah terkait. Dalam APBD pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah merupakan cerminan dari penerapan kebijakan yang diambil pemerintah untuk melaksanakan program daerah atau bisa disebut sebagai anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah. Komponen utamanya yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah [7].

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu suatu penerimaan daerah yang sumbernya dari pengembangan potensi daerah sendiri yang pemungutannya berdasarkan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku pada daerah bersangkutan. Ukuran kemandirian daerah dilihat dari PAD, tinggi rendahnya penerimaan yang diperoleh daerah maka berpengaruh juga peran PAD dalam struktur keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerahnya juga tinggi [8].

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu suatu penerimaan daerah yang bersumber dari dana pemerintah pusat. Dana tersebut dialokasikan pemerintah pusat dengan tujuan peemerataan atau mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah. Pengalokasian dana disesuaikan dengan tujuan pemeraaan dan tetap memperhatikan potensi atau faktor-faktor daerah [5].

Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu suatu penerimaan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat juga, tetapi dana tersebut dialokasikan secara khusus oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ditunjukkan khusus untuk membantu mendanai kegiatan-kegiatan atau masalah-masalah khusus pemerintah daerah, dimana kegiatan khusus tersebut harus sesuai dengan prioritas nasional [3].

Belanja Modal (BM) merupakan salah satu bentuk pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan aktivitas pemerintah yang menjadi tanggungjawab pusat dan pemerintah daerah, meliputi urusan wajib untuk menjamin dan menaikkan taraf hidup rakyat sebagai upaya pemerintah dalam peningkatan pelayanan dasar sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan daerah [9].

Kemiskinan yaitu keadaan seseorang atau sekelompok orang dari segi ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmaninya seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan juga kesehatan. Keadaan miskin dalam suatu kelompok disebabkan karena langkanya alat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dimana terbatasnya alat pemenuhan kebutuhan tidak diimbangi dengan besarnya jumlah kebutuhan masyarakat di suatu daerah. Penduduk yang dikategorikan miskin yaitu ketika seseorang dari segi rata-rata pengeluaran perkaptanya di bawah garis kemiskinan (GK) per bulannya [10].

Kemiskinan muncul di suatu daerah penyebab utamanya karena berawal dari sebuah istilah yang

disebut lingkaran setan kemiskinan atau *Vicious Circle of Poverty*. Lingkaran setan kemiskinan yang dicetuskan oleh Ragnar Nurkse tahun 1953 merupakan keadaan yang menjadi penyebab timbulnya hambatan terhadap terciptanya pembentukan modal yang tinggi di suatu daerah [11]. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian ini dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Ngawi.

2. Metodologi Penelitian

2.1. Penentuan Sampel

Sampel yang ditentukan oleh peneliti merupakan sampel yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* sehingga data yang diperoleh akan sesuai dengan kriteria dalam penelitian. Dari teknik *purposive sampling* didapatkan data berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang berasal dari dokumen Kabupaten Ngawi dalam angka dan data kemiskinan yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan metode studi pustaka dan dokumentasi dengan jenis datanya berupa data sekunder yang berbentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang berasal dari dokumen Kabupaten Ngawi dalam angka dan data kemiskinan yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020. Data tersebut diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi.

2.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan *Software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)* Versi 25. Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah telah terjadi korelasi atau hubungan yang kuat antar variabel bebas yang digunakan peneliti dalam persamaan regresi. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode korelasi parsial dengan menggunakan perbandingan antara nilai R^2 dengan nilai korelasi parsial. Model regresi dapat dikatakan tidak terkena gejala multikolinieritas yaitu jika nilai $R^2 >$ nilai koefisien korelasi parsial. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah telah terjadi *variance* atau ragam yang tidak konstan dalam variabel yang digunakan peneliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode glejser dengan membandingkan antara nilai signifikansi masing-masing variabel dengan $\alpha = 0,05$. Model regresi dapat dikatakan terkena gejala heterokedastisitas jika nilai $\text{sig} > 0,05$ atau $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$.

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antara residual pada periode t dengan residual periode sebelumnya ($t-1$). Dalam hal ini peneliti menggunakan metode Run Test

dengan membandingkan antara nilai *Asymp. Sig* (2-tailed) dengan $\alpha = 0,05$. Model regresi dapat dikatakan terkena gejala autokorelasi jika nilai *Asymp. Sig* (2-tailed) $> 0,05$.

Untuk mengetahui bagaimana arah dan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Sehingga tercipta persamaan regresi yang kemudian diaplikasikan dalam penelitian menggunakan persamaan pada Rumus (1)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \epsilon \quad (1)$$

Dimana Y untuk Variabel Kemiskinan, a untuk Konstanta, b_1 dan b_2 untuk Koefisien regresi, X_1 untuk Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), X_2 untuk Variabel Dana Alokasi Umum (DAU), X_3 untuk Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK), X_4 untuk Variabel Belanja Modal, dan ϵ untuk Nilai Eror.

Terkait uji hipotesis dalam penelitian ini, maka hipotesis akan diterima jika hasil uji F atau uji simultan didapatkan F hitung $> F$ tabel dan hipotesis akan diterima jika hasil uji t atau uji parsial didapatkan t hitung $> t$ tabel. Koefisien determinasi (R^2) yaitu digunakan untuk menunjukkan seberapa besar varians dari variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Jika nilai R^2 mendekati satu maka hampir keseluruhan dari variabel bebas dapat menjelaskan varians dari variabel terikat [12].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dengan metode korelasi parsial didapatkan hasil yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Multikolinieritas Metode Korelasi Parsial

Model	Correlations		
	Zero-order	Partial	Part
X1 = PAD	-0,728	0,318	0,138
X2 = DAU	-0,886	-0,761	-0,483
X3 = DAK	-0,600	-0,025	-0,010
X4 = BM	-0,759	0,083	0,034

a. Dependent Variable: $Y = \text{KEMISKINAN}$

Karena diketahui dari tabel 1. nilai $R^2 = 0,830$ sedangkan nilai dari masing-masing variabel yaitu pada variabel pad sebesar 0,318, dan sebesar -0,761, dan sebesar -0,025, dan belanja modal sebesar 0,034. Karena nilai $R^2 >$ nilai setiap variabel sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam arti tidak ditemukan hubungan yang kuat antara variabel bebas.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser didapatkan hasil disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Sig.

	B	Std. Error	Beta
(Constant)	28,223	10,799	0,026
X1 = PAD	1,502E-11	0,000	0,211
X2 = DAU	-2,720E-11	0,000	-0,881
X3 = DAK	1,833E-11	0,000	0,334
X4 = BM	-1,185E-11	0,000	-0,178

a. Dependent Variable: Abres

Diketahui dari tabel 2. bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel yaitu variabel pad sebesar 0,811, dan sebesar 0,246, dan sebesar 0,552, dan belanja modal sebesar 0,831. Karena nilai signifikansi masing-masing variabel $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam arti *variance* atau ragam variabelnya konstan. Hasil disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji Autokorelasi Metode Run Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-0,54803
Cases < Test Value	7
Cases \geq Test Value	8
Total Cases	15
Number of Runs	6
Z	-1,059
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,290

Karena diketahui dari tabel 3. nilai *Asymp. Sig* (2-tailed) yaitu 0,290 $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi tidak terjadi gejala autokorelasi dalam arti tidak ditemukan hubungan antara residual pada tahun t dengan tahun sebelumnya yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Koefisien Determinasi Persamaan Regresi

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the Estimate
			Square	
1	0,911 ^a	0,830	0,763	13,07267

a. Predictors: (Constant), X4 = BM, X3 = DAK, X2 = DAU, X1 = PAD

Karena diketahui dari tabel 4. nilai koefisiensi determinasi (R^2) yaitu sebesar 0,830 sehingga disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal mempengaruhi kemiakinan di Kabupaten Ngawi sebesar 83% sedangkan sisanya 17% dari model penelitian dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi yang disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Uji F Persamaan Regresi

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	8365,388	4	2091,347	12,238	.001 ^b
1 Residual	1708,946	10	170,895		
Total	10074,334	14			

a. Dependent Variable: $Y = \text{KEMISKINAN}$

Dari tabel 5. nilai F hitung sebesar 12,238 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 sedangkan dengan signifikansi ($\alpha = 0,05$) dan $df (n1) = 4$, $df (n2) = 10$ maka didapatkan F tabel sebesar 3,478.

Karena diketahui nilai F hitung $> F$ tabel jadi dapat disimpulkan bahwa secara parsial atau keseluruhan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Uji t Persamaan Regresi

Unstandardized Coefficients		SC	t	Sig.
B	Std. Error	Beta		
(Constant)	254,587	21,717		11,723
X1 = PAD	1,301E-10	0,000	0,486	1,061
X2 = DAU	-1,647E-10	0,000	-1,420	-3,708
X3 = DAK	-4,673E-12	0,000	-0,023	-0,078
X4 = BM	2,854E-11	0,000	0,114	0,263

Karena diketahui dari Tabel 7 bahwa variabel PAD didapatkan nilai t hitung sebesar 1,061 dan nilai $df: \alpha, (n - k)$ atau $0,05, (15 - 5)$ maka diperoleh t tabel sebesar 1,812. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020 karena diketahui bahwa t hitung $< t$ tabel. Analisis ini didukung dengan nilai signifikansi dari pendapatan asli daerah sebesar 0,314 $> 0,05$ yang berarti bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Ngawi.

Pada variabel DAU didapatkan nilai t hitung sebesar -3,708 dan diketahui nilai $df: \alpha, (n - k)$ atau $0,05, (15 - 5)$ maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,812. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020 karena diketahui bahwa t hitung $> t$ tabel. Analisis ini didukung dengan nilai signifikansi dari dana alokasi umum sebesar $0,004 < 0,05$ yang artinya bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten Ngawi.

Pada variabel DAK didapatkan nilai t hitung sebesar -0,078 dan diketahui nilai $df: \alpha, (n - k)$ atau $0,05, (15 - 5)$ maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,812. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020 karena diketahui bahwa t hitung $< t$ tabel. Analisis ini didukung dengan nilai signifikansi dari dana alokasi khusus sebesar $0,939 > 0,05$ yang artinya bahwa dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten Ngawi.

Pada variabel BM didapatkan nilai t hitung sebesar 0,263 dan dengan $df: \alpha, (n - k)$ atau $0,05, (15 - 5)$ maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,812. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020 karena diketahui bahwa t hitung $< t$ tabel. Analisis ini didukung dengan nilai signifikansi dari belanja modal sebesar $0,798 > 0,05$ yang berarti bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten Ngawi.

PAD dalam kurun waktu 15 tahun yaitu dari tahun 2006 – 2020 tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi, sehingga menunjukkan bahwa penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis atau dugaan sementara dipembahasan sebelumnya dan juga tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif antar variabel. Jadi tinggi rendahnya penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah ini belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Hal ini karena pad digunakan untuk modal pembiayaan belanja daerah sebagai upaya melengkapi sarana prasarana publik penunjang kesejahteraan masyarakat.

Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khusnul Fikri, Usep Sudrajat, dan Yudha Remofa tahun 2019 [13] yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Tetapi bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Chrisanty Paat, Rosalina A.M.Koleangan, dan Vekie A. Rumate tahun 2019 [14] yang menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

DAU dalam kurun waktu 15 tahun yaitu dari tahun 2006 – 2020 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi, sehingga menunjukkan bahwa penelitian ini sesuai dengan hipotesis atau dugaan sementara dipembahasan sebelumnya. Anggaran yang tinggi dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum ini mampu membantu menutupi kekurangan dari pendapatan asli daerah sebagai upaya penanggulangan kesenjangan antar daerah. Dana alokasi umum yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan ini mampu menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten Ngawi telah dikelola atau digunakan sesuai dengan tujuan desentralisasi yaitu kesejahteraan dan kemajuan daerah, khususnya peningkatan kualitas pelayanan yang belum merata.

Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alya Prastika Rany tahun 2021 [5] dan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kadafi dan Murtala tahun 2020 [15] yang menyebutkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan [3].

DAK dalam kurun waktu 15 tahun yaitu dari tahun 2006 – 2020 tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi, sehingga menunjukkan bahwa penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis atau dugaan sementara dipembahasan sebelumnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan dak tiap tahun ternyata belum mampu menjadikan program-program usulan dari pemerintah daerah

terkait pengentasan kemiskinan mampu atau berhasil mengurangi jumlah kemiskinan di Kabupaten Ngawi.

Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jolianis tahun 2016 [16] yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Ika Fitriyanti dan penelitian yang dilakukan oleh Herniwati Retno Handayani tahun 2020 [17] yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

BM dalam kurun waktu 15 tahun yaitu dari tahun 2006 – 2020 tidak berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Ngawi, sehingga menunjukkan bahwa penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis atau dugaan sementara dipembahasan sebelumnya. Dari hasil penelitian menunjukkan belanja modal yang tinggi belum mampu mengoptimalkan penggunaan terhadap fasilitas yang disediakan pemerintah daerah, sehingga tidak berpengaruh terhadap turunnya jumlah kemiskinan di Kabupaten Ngawi.

Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syifa N. Kiai Demak, Vecky A.J Masinambow, dan Albert T Londa tahun 2020 [18] yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andri Widianto, Erni Unggul Sedy Utami, dan Asrofi Langgeng Nurmansyah tahun 2016 [19] dan penelitian yang dilakukan oleh T. Fahrurizza Putrayuda, Yulia Efni, dan Kamaliah tahun 2017 [20] yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telak dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020. Sedangkan secara parsial PAD tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020. DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020. DAK tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020. Belanja modal tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006 – 2020.

Daftar Rujukan

- [1] Estrada, A. A. E., & Wenagama, I. W. (2019). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8(7), 1637-65.
- [2] Pratama, N. R. N. S., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(0), 07.
- [3] Rasu, K. J. E., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. (2021). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(4), 12-25. DOI: <https://doi.org/10.35794/jpekd.32803.20.4.2019>
- [4] Paulus, D. I. S., Koleangan, R. A., & Engka, D. S. (2019). Analisis pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap kemiskinan melalui belanja daerah di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 18(5). DOI: <https://doi.org/10.35794/jpekd.15781.19.2.2017>
- [5] Rany, A. P. (2021). Pengaruh PAD, DAU, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan (Studi Kasus 38 Kab/Kota Di Prov Jawa Timur Periode 2010–2019). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7374>
- [6] Sulastri, E. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Kabupaten/Kota Di Seluruh Provinsi Di Kalimantan Tahun. http://info.trilogi.ac.id/repository/assets/uploads/AKT/b06ca-jurnal_evi-sulastri_17116021_final.pdf.
- [7] Salindeho, C. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3). DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.4.3.2016.14376>
- [8] Marsuroh, R., & Nurhayati, N. (2016, May). Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan. In Prosiding Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT) 2016 Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis IPTEK, 1(1).
- [9] Armaawaddina, M., Rumbiaa, W. A., & Afiata, M. N. (2017). Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Flypaper Effect Analysis of District and City Regionally Spending in Sulawesi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 18(1), 77-91.
- [10] Ferezagia, D. V. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.7454/jsh.v1i1.6>
- [11] Machmud, A. (2016). *Perekonomian Indonesia pasca reformasi*. Erlangga.
- [12] Suliyanto, D. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS* (Kesatu).
- [13] Fikri, K., Sudrajat, U., & Remofa, Y. (2019). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(2), 257-269. doi: 10.34006/jmbi.v8i2.111.
- [14] Paat, D. C., Koleangan, R. A., & Rumate, V. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 18(4). doi: <https://doi.org/10.35794/jpekd.15774.19.1.2017>.
- [15] Kadafi, M., & Murtala, M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-2017. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(2), 23-31. doi: [10.29103/jeru.v3i2.3203](https://doi.org/10.29103/jeru.v3i2.3203).
- [16] J.jolianis koto. (2016). Analisis Pengaruh PAD, DAU dan

- Dak terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening. *None*. doi: 10.22202/economica.2016.v4.i2.633.
- [17] Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 79-90. <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3323/>.
- [18] Demak, S. N. K., Masinambow, V. A., & Londa, A. T. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan Belanja Modal dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01).
- [19] Widianto, A., Sedyautami, E. U., & Nurmansyah, A. L. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Tegal). *Monex: Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 5(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.30591/monex.v5i2.417>
- [20] Putrayuda, T. F., Efni, Y., & Kamaliah, K. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Tingkat Kemiskinan Di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 9(3), 198-224.